

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atikah, Waluyo dalam Ika. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Haura Utama. Sukabumi.
- BPS. 2025. *Distrik Maladum Mes Dalam Angka 2024*. BPS. Kota Sorong.
- Bushar, Muhammad. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dewan Kehutanan Nasional Dan UN-REDD Programme Indonesia. 2011. *Rekomendasi Kebijakan: Instrument Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak Dalam Aktivitas REDD+ Di Indonesia*. Dewan Kehutanan Nasional. Jakarta.
- Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2021. *Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Kemasyarakatan*. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Jakarta.
- Firdaus, Asep Yunan. 2018. *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Percepatan Reformasi Tenurial Hutan*. CIFOR. Bogor.
- FWI. 2019. *Bioregion Papua: Hutan & Manusianya*. FWI. Bogor.
- Larson, Anne M. 2013. *Hak Tenurial Dan Akses Ke Hutan: Manual Pelatihan Untuk Penelitian*. CIFOR. Bogor.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Grub. Jakarta.
- Rachman, Noer Fauzi dan Nurjaya, I Nyoman. 2000. *Sumber Daya Alam Untuk Rakyat: Modul Lokakarya Penelitian Hukum Kritis-Partisipatif Bagi Pendamping Hukum Rakyat*. Lembaga Studi Advokasi Masyarakat. Jakarta.
- Rachman, Noer Fauzi dan Siscawati, Mia. 2014. *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya (Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012)*. Insist Press. Yogyakarta.
- Rosyida, Hilmi dan Bisariyadi. 2005. *Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Safitri, Myrna A., et al. 2011. *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial*. Epistema Institute. Jakarta.
- Saweri, David et al. 2021. *Potret Hutan Papua*. WRI Indonesia. Jakarta.
- Sohibuddin. 2010. *Memahami Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat*. AMAN. Jakarta.

- Sumardjono, Maria S.W. 2019. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Wiratraman, Herlambang P. et al.. 2018. *Pandangan Hukum Hutan Adat Papua dan Papua Barat*. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Indonesia. Jakarta.
- Zakaria, R. Yando. "Kompleksitas Tanah Adat dan Alternatif Solusi Penanganannya." Dalam Nurhasan Ismail, et al. 2023. *Menelusuri Pemikiran Hukum Agraria Prof. Maria S. W. Sumardjono*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Zakaria, R. Yando. 2000. *Abih Tandeh: Masyarakat desa di bawah rezim Orde Baru*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta.

### Artikel Jurnal

- Dewi, Indah Novita et al.. "Karakteristik Petani Dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Terhadap Pendapatan Petani Di Kulon Progo." *Jurnal Ilmu Kehutanan*. Vol. 12. No. 1. 2018. 86-98. <https://doi.org/10.22146/jik.34123>.
- Dewi, Indah Novita. "Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. Vol. 15. No. 2. 2018. 65-77.
- Faryadi, Erpan dan Elisabeth, Asrida. "Memeriksa Program TORA dan Perhutanan Sosial di Jayapura Dan Keerom." *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*. Vol. 38. 2020. 197-210.
- Fikri, MHD Zakiul. "Paradigma Ekologi Konsep Hak Menguasai Negara di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9. No. 1. 2020. 93-115.
- Hidayat, Muhammad Taufiq, dan Eko Rial Nugroho. "Kedudukan Hak Milik Perorangan Atas Tanah Adat Suku Moi Di Papua Barat (Studi Kasus Pada Kota Sorong Provinsi Papua Barat)." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. 2024. 113-124.
- Nugroho, Wahyu. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11. No. 1. 2014.
- Pambudi, Andi Setyo. "Capaian, Tantangan Implementasi, dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 6. No. 2. 2023. <https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3551>.
- Peluso, Nancy Lee dan Poffenberger, Mark. "Social Forestry in Java: Reorienting Management Systems." *Human Organization*. Vol. 48. No. 4. 1989. 333-44. <http://www.jstor.org/stable/44126765>.
- Ribot, Jesse C., dan Nancy Lee Peluso. "A Theory of Access." *Rural sociology*. Vol. 68. No. 2. 2003. 153-181.

- Sahlins, M.D. "Poor Man. Rich Man. Big-Man. Chief: Political Types in Melanesia and Polynesia". *Comparative Studies in Society and History*. 1963. 5: 285-303.
- Sami, Rima Gulam. "Implikasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial terhadap Swadaya Ekonomi Masyarakat dalam Program Perhutanan Sosial (Studi Pada Kelompok Tani Nagari Latang Kab. Sijunjung)." *Swara Justisia*. Vol. 4, No. 2. 2020. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i2.158>.
- Savitri, Laksmi A.. "Reforma Agraria Kehutanan dan Perluasan Privatisasi Tanah di Merauke. Papua." *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*. 38. 2020. 171-196.
- Schlager, Edella dan Ostrom, Elinor. "Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis." *Land economics*. 1992.
- Siscawati, Mia. "Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan." *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*. Vol. 33 No. 16. 2020.
- Sudiyono. "Problematik Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Papua." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol. 9. No. 1. 2007. 79-104.
- Zain, Mochamad Adib dan Siddiq, Ahmad. "Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 2, No. 2, 2015.

## Hasil Penelitian

- Anna, Zuzy. 2018. *Kajian Evaluasi Ekonomi Lanskap Masyarakat Adat Moi Kelim di Kampung Malaumkarta, Papua Barat*. Hasil Penelitian. AMAN. Jakarta Selatan.
- Gulfino et al. 2020. *Problematika Perhutanan Sosial di Tanah papua: Menagih Komitmen Kebijakan dan Anggaran*. Hasil Penelitian. Seknas Fitra. Jakarta.
- Hadid, Muhammad Faturrachman. 2024. *Implikasi Hukum Penerbitan Surat Izin Pengelolaan Kawasan Hutan Adat oleh DPMPSTP Provinsi Papua terhadap Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu (Studi Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan Adat oleh PT Indo Asiana Lestari di Kabupaten Boven Digoel)*. Tesis. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta.
- Muhajir, Mumu dan Syahrul Fitra. 2018. *IUPHHK-MHA dan Masa Depan Pengelolaan Hutan oleh Masyarkat Adat Papua*. Hasil Penelitian. Auriga. Jakarta.
- Sahertian, Adri. 2018. *Tradisi Lisan Pendidikan Adat Kambik Suku Moi dalam Memori Kolektif*. Tesis. Magister Sosiologi Agama Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana. Sidorejo.

Sari, Almonika Cindy Fatika. 2018. *Hak Tenurial Atas Hutan Dalam Masyarakat Hukum Adat Marga Bengkuntat. Pesisir Barat. Lampung*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Simarmata, Rikardo and Utama, Tody Sasmitha Jiwa. 2021. *Menentukan Sendiri Jalan Menuju Hak atas Tanah: Review atas Berbagai Pilihan Pengakuan Tenurial di Indonesia*. Hasil Penelitian. Forest Peoples Programme. England.

Tim Ahli Penilaian Ekonomi Tim Ekonomi AMAN. 2018. *Appraising Economic Performance of Indigenous Peoples' Sustainable Landscape Management (Result Consolidation A Study on Natural Resources Economic Valuse in Sustainable Landscape Management in 6 Indigenous Peoples Territories)*. AMAN. Bogor.

Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2021. *Laporan Akhir Inventarisasi Dan Identifikasi Tanah Ulayat Di Provinsi Bali Dan Nusa Tenggara Timur*. Hasil Penelitian. Pusat Kajian Hukum Adat Djodjodigoeno FH UGM. Yogyakarta.

### **Diskusi dan Konferensi**

Arizona, Yance. "Kelembagaan Negara Dan Masyarakat Adat Yang Diperlukan Untuk Penguatan Hak Konstitusional Masyarakat Adat." Makalah. Diskusi Penguatan. Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Guna Restorasi Sosial Indonesia Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Jakarta. 1 Juni 2016.

Bosko, Rafael Edy. "Reconsidering the Inalienability of Communal Ulayat Rights: Theoretical Overview." dalam *The 9th ALIN Expert Forum on Land Rights Law in Asian Countries* (Fakultas Hukum UGM: kerja sama Fakultas Hukum UGM. Korea Legislation Research Institute dan Asia Legal Information Institute, 2014).

Nurrochmat, Dodik Ridho. "Resiliensi Masyarakat Adat Dalam Perubahan Iklim; Produksi Pangan. Dinamika Karbon. Gangguan Ekosistem Dan Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan." dalam *Dekonstruksi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka Konstitusional* (Program Studi Kehutanan Universitas Bengkulu: Akar Global Inisiatif, 2025).

Sahambangun, Devy S., *et al.* "Makna Ruang Rumah Berlabuh Masyarakat Serui Ansus di Kota Sorong." Prosiding Temu Ilmiah IPLBI. 2015.

Simarmata, Rikardo. "Arah Dan Tantangan Politik Legislasi Mengenai Masyarakat Hukum Adat." dalam *Dekonstruksi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka Konstitusional*. Fakultas Hukum Bengkulu: Akar Global Inisiatif, 2025.

## Internet

- Ahdiat, Adi. “Luas Hutan Indonesia 2022, Terbesar Di Papua.” [katadata.co.id](http://katadata.co.id). December 19, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/3127122de6d74f3/luas-hutan-indonesia-2022-terbesar-di-papua>.
- Badan Registrasi Wilayah Adat. “Wilayah Adat Moi Kelim,” <https://brwa.or.id/wa/view/cENacI9Vb1ZKMVk>.
- BKKBN. “Profil Kampung KB Saoka.” <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/20644/kampung-kb-saoka>.
- CIFOR-ICRAF Program Indonesia. “Mendorong Percepatan Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat Melalui Sistem Informasi.” <https://www.cifor-icraf.org/publications/sea/Publications/files/booklet/BL00461-24.pdf>.
- Elisabeth, Asrida. “Catatan Akhir Tahun: Perhutanan Sosial dan Sulitnya Penetapan Hutan Adat di Tanah Papua.” <https://mongabay.co.id/2020/12/24/catatan-akhir-tahun-perhutanan-sosial-dan-sulitnya-penetapan-hutan-adat-di-tanah-papua/>.
- Hidayat, Yayan. “Policy Brief Reformasi Kebijakan Tenurial: Meretas Kemiskinan Masyarakat Adat dalam Kawasan Hutan.” <https://aman.or.id/files/publication-documentation/37832Policy-Brief-Reformasi-Kebijakan-Tenurial%202019.pdf>.
- Mahrus, Muhammad Ali. “Ignore Recognition: Reflections on the Recognition of Indigenous Papuans in Jokowi’s Development Regime.” <https://sahkanruumasyarakatadat.id/en/publikasi-rma/pengakuan-yang-diabaikan-refleksi-pengakuan-masyarakat-adat-papua-dalam-rezim-pembangunan-jokowi/>.
- Mansoben, J.R. “Karakter Orang Papua dalam Perspektif Sosio Kultural.” [https://wri-indonesia.org/sites/default/files/KARAKTERISTIK\\_ORANG\\_PAPUA\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_SOSIO\\_KULTURAL\\_JM\\_0.pdf](https://wri-indonesia.org/sites/default/files/KARAKTERISTIK_ORANG_PAPUA_DALAM_PERSPEKTIF_SOSIO_KULTURAL_JM_0.pdf).
- Ramadhan, Fajar. “Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Menjadi Jalan Damai di Papua.” <https://www.kompas.id/artikel/mengelola-sektor-kehutanan-untuk-ketenteraman-papua>.
- Siregar, Hajirin. “Dewan Adat Suku Besar Moi, Tetapkan Keluarga Kalawaisa Sebagai Pemilik Hak Tanah Adat, dari Saoka Sampai Malanu Kampung.” <https://www.bharindonesia.com/bisnis/119754903/dewan-adat-suku-besar-moi-tetapkan-keluarga-kalawaisa-sebagai-pemilik-hak-tanah-adat-dari-saoka-sampai-malanu-kampung?utm>.
- Sorry, Isak. “Marga Mubalus Tidak Hadir, Keputusan Sidang Wilayah Adat Arteri-Saoka Dinilai Sepihak.” <https://pbdnews.com/2025/08/marga-mubalis-tidak-hadir-keputusan-sidang-wilayah-adat-arteri-saoka-dinilai-sepihak/>.

Zakaria, R. Yando. “Pedoman Penapisan Keberadaan Masyarakat Adat.” [https://www.academia.edu/38679992/Pedoman\\_Penapisan\\_Keberadaan\\_Masyarakat\\_Adat](https://www.academia.edu/38679992/Pedoman_Penapisan_Keberadaan_Masyarakat_Adat). diakses pada 30 Juli 2025.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 16 Mei 2013.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial sebagaimana telah dicabut melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 320).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 320).

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5920/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Hutan Suagai Seluas ± 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Hektare pada Kawasan Hutan Lindung Seluas ± 34 (Tigas Puluh Empat) Hektare dan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 216 (Dua Ratus Enam Belas) Hektare di Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes Kota Sorong Provinsi Papua.

Keputusan Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua Barat Nomor: Sk.250/X-5/BPSKL.2.1/12/2018.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua.

- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat.
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 10 tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat
- Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Rakyat.
- Peraturan Walikota Sorong Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Suku, Sub Suku, Alokasi Kursi dan Daerah Pengangkatan Kota Sorong (Berita Daerah Kota Sorong Tahun 2022 Nomor 13).
- Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat.